

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka yang terjalin masih belum optimal karena masih terhalang oleh berbagai kendala struktural sehingga diperlukan perubahan dari sekadar kesepakatan tertulis menjadi tindakan kolektif yang lebih komprehensif agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Mengacu pada kerangka teori Ansell dan Gash dari tahun 2008, Meskipun dialog tatap muka telah dilakukan secara rutin sebagai alat koordinasi, kualitas interaksinya masih bersifat satu arah dan belum mampu menyentuh inti persoalan di tingkat bawah. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat belum tumbuh secara seimbang yang mana rasa saling percaya baru terbangun kuat di tingkat internal antara Pemerintah dan Pokdarwis, sementara di tingkat masyarakat luas masih terdapat keraguan dan sikap tidak yakin terhadap keberlanjutan program. Akibatnya, komitmen terhadap proses kolaborasi menjadi belum menyeluruh, yakni terbatas pada kepatuhan prosedur resmi dan inisiatif mandiri pengelola, namun belum didukung oleh kesadaran bersama warga secara luas. Hal ini menyebabkan pemahaman visi bersama menjadi tidak merata, sehingga hasil nyata antara tahun 2021 hingga 2025 masih sebatas pada penyediaan sarana fisik dasar

dan edukasi Geopark, tanpa adanya dampak ekonomi langsung yang berarti bagi masyarakat lokal.

Interaksi antara faktor pendorong dan penghambat juga berpengaruh dalam dinamika kolaborasi ini yang dianalisis menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan. Faktor pendukung utama adalah pola kepemimpinan fasilitatif yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Ini didukung oleh modal sosial yang terjalin berupa hubungan antar aktor yang harmonis dan bebas dari konflik masa lalu. Pada sisi lain, kolaborasi ini mengalami hambatan strategis yaitu ketidakseimbangan sumber daya, utamanya terkait ketidakjelasan status lahan yang menghalangi legalitas pembangunan sarana fisik serta kesadaran masyarakat. Ketergantungan finansial dari Pokdarwis pada dukungan dana pemerintah juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas kerja sama.

Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan destinasi wisata ini sangat bergantung pada kemampuan para aktor untuk beranjak dari sekadar kesepakatan di atas kertas menuju tindakan nyata dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Tanpa adanya perbaikan pada kualitas dialog dan penguatan kepercayaan di tingkat akar rumput, kolaborasi ini berisiko tetap menjadi proses administratif yang belum mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keterbatasan dalam uji silang data sehingga analisis belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga perspektif mengenai hambatan kolaborasi masih didominasi oleh pihak Pemerintah dan Pokdarwis.
2. Analisis pada rendahnya tingkat kepercayaan masih memerlukan penggalan lebih dalam kondisi sosial masyarakat di balik sikap skeptis masyarakat.
3. Penelitian ini terbatas pada hasil sementara berupa pencapaian fisik dan administratif, sehingga dampak ekonomi nyata bagi masyarakat belum dapat diukur secara menyeluruh.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan serta mengacu pada temuan lapangan, maka peneliti memberikan beberapa saran terhadap *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata pendulangan intan di Pumpung Cempaka:

1. Disarankan agar pemerintah membentuk langkah strategis untuk mempercepat proses penegakan hukum, seperti MoU penggunaan lahan yang bisa memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pembangunan fisik, sehingga pengembangan infrastruktur tidak terganggu oleh masalah administratif.
2. Sosialisasi visi kerja sama harus dilakukan dengan lebih melibatkan masyarakat agar mereka merasa bahwa peran masyarakat juga penting sebagai aktor pendorong.

3. Untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah yang terbatas, diperlukan peningkatan kemandirian finansial Pokdarwis melalui pengembangan usaha kreatif seperti penyediaan kuliner khas daerah dan souvenir khas dari kegiatan pendulangan intan.
4. Terakhir, peran pihak swasta dapat dimasukkan sebagai biro perjalanan wisata dengan membuat kerja sama dalam pemasaran dan promosi secara digital tanpa memberi hak menguasai lahan agar keaslian kawasan tetap terjaga namun jangkauan pasar semakin luas.